

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan. Pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Oleh karena itu pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, sekolah dan masyarakat.

Program pembangunan di bidang pendidikan diarahkan untuk mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Salah satu upaya diantaranya dengan menegakkan tata tertib sekolah. Untuk komponen yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan di sekolah perlu adanya pedoman tentang tata tertib sekolah.

Tujuan tata tertib sekolah sangat penting. Secara umum dibuatnya tata tertib sekolah mempunyai tujuan utama agar semua warga sekolah mengetahui apa tugas, hak dan kewajiban serta melaksanakan dengan baik sehingga kegiatan sekolah dapat berjalan dengan lancar. Prinsip tata tertib sekolah adalah diharuskan, dianjurkan dan ada yang tidak boleh dilakukan dalam pergaulan di lingkungan sekolah.

Tata tertib sekolah harus ada sanksi atau hukuman bagi yang melanggarnya. Menjatuhkan hukuman sebagai jalan keluar terakhir, harus dipertimbangkan perkembangan siswa. Sehingga perkembangan jiwa siswa tidak dan jangan sampai dirugikan. Menurut Suryosubroto (2010: 81) bahwa tata tertib sekolah dibuat dengan tujuan sebagai berikut:

(1) agar siswa mengetahui tugas, hak dan kewajibannya, (2) agar siswa mengetahui hal-hal yang diperbolehkan dan kreatifitas meningkat serta terhindar dari masalah-masalah yang dapat menyulitkan dirinya, dan (3) agar siswa mengetahui dan melaksanakan dengan baik dan sungguh-sungguh seluruh kegiatan yang telah diprogramkan oleh sekolah baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.

Tujuan tata tertib sekolah diatas memiliki makna yang sama dengan harapan pemerintah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 3 yang menyatakan bahwa:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pendidikan nasional mempunyai visi atau pandangan masa depan terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Berbagai usaha untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional telah dilakukan oleh para ahli pendidikan melalui pembaharuan-pembaharuan yang sekarang telah dilaksanakan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga pendidikan non pemerintah. Salah satu faktor penunjang keberhasilan pemerintah dalam bidang pendidikan adalah guru. Tugas guru bukan hanya sebagai pengajar tapi sebagai pendidik, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Guru merupakan sosok yang menjadi idola bagi anak didik. Keberadaannya sebagai jantung

pendidikan tidak bisa dipungkiri. Baik atau buruknya pendidikan sangat tergantung pada sosok seorang guru (Asmani, 2012:71)

Guru merupakan pendidik sekaligus pengajar bagi siswa agar nantinya siswa menjadi warga negara yang sadar akan hukum. Siswa yang sadar akan hukum dapat kita lihat dari sejauh mana siswa tersebut mematuhi tata tertib sekolah. Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang memiliki tujuan membentuk manusia yang berkualitas, tentunya sangat diperlukan suatu aturan guna mewujudkan tujuan tersebut. Lingkungan sekolah khususnya tingkat SMA yang berangotakan remaja-remaja yang sedang dalam masa transisi, sangat rentan sekali terhadap perilaku yang menyimpang. Oleh karena itu diperlukan suatu hukum atau aturan yang harus diterapkan di sekolah yang bertujuan untuk membatasi setiap perilaku siswa. Di lingkungan sekolah yang menjadi aturannya adalah kebijakan tata tertib sekolah.

Kebijakan tata tertib sekolah merupakan salah satu bentuk aturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh siswa, sebagai satu perwujudan kehidupan yang sadar akan hukum dan aturan. Kebijakan tata tertib sekolah adalah rambu-rambu kehidupan bagi siswa dalam melaksanakan kehidupan dalam masyarakat sekolah.

Tata tertib sekolah merupakan salah satu bentuk kebijakan kepala sekolah dalam rangka pembinaan generasi muda dan pembentukan manusia disiplin dan terdidik. Masalah yang dihadapi dalam pembangunan pendidikan adalah bagaimana meningkatkan mutu pendidikan, baik yang bersifat pengetahuan

maupun sikap. Usaha pertama yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam pembinaan sikap yaitu melalui kebijakan tata tertib sekolah.

Sebagaimana diketahui dewasa ini banyak sekali siswa sekolah pada umumnya terlibat dalam kenakalan remaja, pergaulan bebas, penggunaan narkoba, tawuran antar sekolah serta penggunaan etika yang salah dalam kehidupan. Hal ini dikarenakan siswa tidak mematuhi tertib sekolah seperti bolos sekolah. Sebagaimana yang peneliti amati dengan melalui observasi di SMA Negeri 1 Sang Tombolang, bahwa kebijakan tata tertib di SMA Negeri 1 Sang Tombolang kurang optimal dan belum sepenuhnya memenuhi harapan, hal ini masih adanya aturan-aturan tata tertib yang belum dilaksanakan sepenuhnya seperti aturan jam masuk kelas. Kemudian masih banyak siswa yang melanggar kebijakan tata tertib, yakni masih banyak siswa yang tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah seperti kenakalan yang dilakukan siswa, terlambat masuk sekolah, bolos sekolah sebelum jam keluar, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan tata tertib. Selanjutnya, kurangnya kesadaran siswa dalam mematuhi kebijakan tata tertib di sekolah seperti siswa masih melanggar tata tertib yang telah ditetapkan.

Perilaku seperti ini perlu diperhatikan oleh kepala sekolah sehingga untuk menciptakan manusia disiplin dan terdidik dapat tercapai sesuai dengan apa yang menjadi harapan dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu melalui kebijakan tata tertib sekolah diharapkan siswa dibiasakan melaksanakan kehidupan sesuai dengan aturan yang berlaku di masyarakat.

Pembudayaan disiplin tidak cukup hanya dengan melalui peraturan tata tertib yang diumumkan secara lisan atau tertulis saja. Keteladanan dorongan serta bimbingan dalam bentuk-bentuk konkrit sangat diperlukan bahkan keikutsertaan warga sekolah secara langsung akan lebih tepat dan berhasil. Oleh karena itu, satu-satunya harapan agar apa yang telah tertuang dalam buku petunjuk ini dapat di implementasikan dengan sebaik-baiknya diperlukan adanya kesadaran yang penuh, kesiapan untuk melakukan, serta langkah-langkah nyata dalam perbuatan dari semua pihak warga sekolah yaitu Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah dan Siswa.

Implementasi peraturan sekolah tentang *Punishment* (hukuman) akan diberikan kepada peserta didik yang melanggar kebijakan tata tertib sekolah. Implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pelaksanaan, penerapan, (bentuk atau hal yang disepakati). *Punishment* adalah kata sarapan dari bahasa inggris yang diawali dengan kata *punish*, yang artinya menghukum, sedangkan *punishment*, artinya 1. Hukuman; 2. Siksaan. Dalam penelitian ini penulis mengambil kata “hukuman” yang akan di berikan kepada peserta didik di SMA Negeri 1 Sang Tombolang yang melanggar kebijakan tata tertib.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji tentang efektivitas penerapan kebijakan tata tertib sekolah yang akan berkaitan dengan pembentukan sikap. Dengan menformulasikan kedalam judul penelitian: **“Implementasi Kebijakan Tata Tertib di SMA Negeri 1 Sang Tombolang”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah rumusan kebijakan tata tertib di SMA Negeri 1 Sang Tombolang?
2. Bagaimanakah implementasi kebijakan di SMA Negeri 1 Sang Tombolang?
3. Upaya apa yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam meningkatkan kesadaran siswa dalam mematuhi tata tertib di SMA Negeri 1 Sang Tombolang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian mengenai implementasi kebijakan tata tertib sekolah di SMA Negeri 1 Sang Tombolang ini mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis rumusan kebijakan tata tertib di SMA Negeri 1 Sang Tombolang?
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan di SMA Negeri 1 Sang Tombolang?
3. Untuk mendeskripsikan upaya kepala sekolah dalam meningkatkan kesadaran siswa dalam mematuhi tata tertib di SMA Negeri 1 Sang Tombolang

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi berupa informasi yang jelas mengenai rumusan kebijakan tata tertib, implementasi kebijakan dan upaya kepala sekolah dalam meningkatkan kesadaran siswa dalam mematuhi tata tertib di SMA Negeri 1 Sang Tombolang.

2. Manfaat praktis

Penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran betapa pentingnya tata tertib sekolah. Selain itu, akan memberikan solusi praktis atas problematika yang muncul dalam masalah rumusan dan implementasi kebijakan di sekolah sebagai upaya pencapaian tujuan pendidikan dengan meyelaraskan pendidikan karakter dalam proses pembelajaran di sekolah.